

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Harun, S.H.,M.H

Ketua Pusat Studi Perizinan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pergulatan dunia pemikiran saat ini belum berakhir dan tidak akan berakhir selama kehidupan manusia masih pada fitrahnya. Allah telah membekali manusia ciptaan-Nya dengan *af'idah* atau kemampuan berfikir, yakni pemberian khusus yang hanya diberikan pada manusia dan tidak diberikan pada makhluk yang lainnya. Dengan fitrah itulah manusia mengembangkan diri dengan akalnya. Bahkan dalam perkembangannya, ketinggian kemampuan penggunaan akal akan menentukan tinggi rendahnya manusia itu sendiri. Pergulatan ini tidak jarang terjadi saling bekerjasama, saling menelakung, melenyapkan dan saling menghancurkan, bahkan saling memanfaatkan pikiran satu dengan yang lain untuk membangun dinasti pemikiran yang baru.

Dalam dunia hukum, bangunan dinasti pemikiran itu akan melahirkan doktrin doktrin hukum baru dan dalam spektrum politiknya akan lahir penguasa yang akan melahirkan prinsip kebijakan baru lewat dunia kekuasaannya. Pergulatan ini tidak pernah berhenti dan istirahat dalam kondisi apapun juga. Demikian juga dalam komunitas regional dalam suatu negara, pergulatan saling mempengaruhi, mengintimidasi, melenyapkan selalu berjalan dalam panggung kehidupan ini. Kalau manusia telah berhenti dari aktifitas ini mungkin dunia ini menjadi monoton, menjemukan dan membosankan dan itulah akhir dari identitas kehidupan manusia. Mungkin akan lahir kehidupan barbar yang mengandalkan kekuatan fisik, saling menyakiti, mematikan dan melahirkan generasi hayawani di dunia modern.

Kehidupan bersama dalam satu negara dengan ideologi tertentu juga tidak menghentikan pergulatan pemikiran itu. Saat ini juga sedang bergulat dengan sengitnya perebutan pengaruh antara otokrasi dengan demokrasi. Dalam dunia perizinan juga sedang bergulat antara *freies ermessen* dengan *citizen*

friendly dalam negara yang *eenvergunninggeland*. Pergulatan ini akan menggeser persepsi dan konsepsi perizinan yang semula instrumen kekuasaan, bergeser menjadi instrumen kebijakan penguasa, menuju perizinan sebagai instrumen keseimbangan antara negara, korporasi dan masyarakat secara luas.

Di awal pertumbuhannya perizinan adalah merupakan instrumen kekuasaan, sehingga negara secara sepihak dapat menentukan diizinkan atau tidaknya suatu aktivitas warga negaranya. Dalam kehidupan yang semakin demokratis, maka perizinan bergeser sebagai instrumen kebijakan penguasa. Pada tahapan ini kemauan penguasa terkristalisasi dalam bentuk peraturan, maka peraturan hukum berperan sebagai pelindung dari kebijakan negara, yang terinterpretasi dalam bentuk mekanisme yang terukur dan kaku. Sehingga rumusan aturan hukum bekedudukan sebagai proposisi yang postulatif.

Di era yang semakin demokratis selayaknya perizinan dikembangkan sebagai instrumen penjaga keseimbangan kepentingan secara proporsional. yakni penguasa disatu pihak, pihak yang memerlukan perizinan di lain pihak, serta masyarakat luas yang dapat diuntungkan atau dirugikan dengan perizinan tersebut di pihak yang lain pula. Pada tahap ini perizinan tidak sekedar aturan hukum yang mekanistik dan kaku sebagai instrumennya, tetapi negara dipersonifikasi sebagai pelayan publik, yang mampu menggunakan hukum sebagai pemandu untuk mempertemukan kepentingan para pihak secara harmonis dan berkeselamatan untuk kesejahteraan manusianya. Dengan demikian hukum diposisikan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan manusianya, bukan sebaliknya.

Buku "*Perizinan di Era Citizen Friendly*" merupakan Prosiding Seminar Nasional dengan tema "*Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi*" yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 29 April 2017. Buku ini merupakan buku pelengkap dari buku sebelumnya dengan judul "*Perizinan di Era Industrialisasi*" yang terbit pada tahun 2016. Selain itu, terbitnya buku ini juga dalam rangka *Launching* Pusat Studi Perizinan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini semua merupakan bagian dari ikhtiar Fakultas Hukum UMS

untuk terbangunnya dunia perizinan di Indonesia yang mampu berperan sebagai instrumen penjaga keseimbangan kepentingan secara proposional menuju terwujudnya kesejahteraan secara merata. Semoga Allah meridhoinya.